



PENETAPAN

Nomor: 0200/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hasanuddin bin Ratmaji, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I;

Masiah binti Mustakim, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 19 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0200/Pdt.P/2016/PA.Sel. tanggal 19 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal, 27 September 2000 di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung bernama Mustakim, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Ismail bin Abd. Mutalib dan Zakaria bin Abdurrahman dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Waq Ratmaji dan Inaq Sahlan) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq Limah dan Inaq Usman);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama :
 1. Zia Daturrahmah, umur 15 tahun
 2. Istiana Husniah, umur 12 tahun
 3. Gaga Hurrahmah, umu 3 tahun;

Hal. 2 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa nomor 460/147/Pem./KTR/2016, tanggal 10 Maret 2016 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/1037/HK.05/IV/2016, tanggal 14 April 2016 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I H.Asanuddin bin Ratmaji dengan Pemohon II Masiah binti Mustakim yang dilaksanakan pada tanggal, 27 September 2000 di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. ;

Hal. 3 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan selanjutnya surat Permohonan tersebut telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan oleh para;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonan tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik : 5203010107800757 06/10/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda bukti (P.1);*
2. *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik : 5203014107830433, tanggal 06/10/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda bukti (P.2) ;*

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, para Pemohon menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut:

- 1 H. Ismaun bin Wak Nuhung, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Bertempat tinggal di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 4 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 H. Ismail bin H. Abdul Muthalib, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertempat tinggal di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal tanggal, tanggal, 27 September 2000 di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung bernama Mustakim, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Ismail bin Abd. Mutalib dan Zakaria bin Abdurrahman dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus masih gadis;
- Saksi tahu keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

Hal. 5 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Zia Daturrahmah, umur 15 tahun;
 2. Istiana Husniah, umur 12 tahun;
 3. Gaga Hurrahmah, umu 3 tahun;
- Saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Hal. 6 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 September 2000_ sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal, 27 September 2000 di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung bernama Mustakim, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Ismail bin Abd. Mutalib dan Zakaria bin Abdurrahman dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Zia Daturrahmah, umur 15 tahun
 2. Istiana Husniah, umur 12 tahun
 3. Gaga Hurrahmah, umu 3 tahun;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Hal. 8 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan I'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر

صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W.22-A4/1037/HK.05/IV/2016 tanggal 14 April 2016 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun: 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2015 tanggal 7 Desember 2015;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I H.Asanuddin bin Ratmaji dengan Pemohon II Masiah binti Mustakim yang dilaksanakan pada tanggal, 27 September 2000 di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun: 2016 Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2015 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H., oleh Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: 0200/Pdt.P/2016/PA.Sel. Tanggal 19 April 2016 serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu H. Jalaluddin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ahmad Rifa'i, S.Ag. ,M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 156.000,-

Hal. 11 dari 11 Penetapan. No. 0200 /Pdt.P/2016/PA.Sel.